

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas yang harus dipertanggungjawabkan.

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal. Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah harus

diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh masyarakat.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. Harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan tanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintah yang lebih baik.

Menurut Ulum, (2012: 20) dalam Fifit dan Nadirsyah (2016) pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut. Pemerintahan daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber pengesahannya dari masyarakat, jadi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah harus melalukan pekerjaannya dengan baik.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan dengan erat dengan pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran anggaran. Memantapkan mekanis

akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. kinerja pemerintah dikatakan baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintah sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Terkait kinerja pemerintahan daerah Kab. Rokan hulu yang penulis kutip dari DetakRiauNews yaitu pemerintahan Kab. Rokan Hulu mendapatkan nilai C-c untuk laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintahan (LAKIP) yang di berikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi. Dari laporan tersebut sudah kelihatan bahwa kinerja pemerintah daerah belum komitmen terhadap akuntabilitas yaang baik dari sisi kebijakan anggaran, belanja, pendapatan dan nilai pekerjaan yang dilakukan (DetakRiauNews 29-01-2018).

Dari masalah tersebut menunjukan bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum menerapkan pengawasan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip good governance pada kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi antara lain *transparancy, responsiveness, consessus, orentation, equity, efficiency, dan effectiveness, serta accountability.*

Berdasarkan karakteristik tersebut yang terjadi di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu inilah yang menarik penelitian untuk meneliti lebih jauh mengenai kondisi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari *good governance* serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan *good governance* secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu** “

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengawasan keaungan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerinahan daerah Kabupaten Rokan Hulu ?
4. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

5. Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah secara simultan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca, bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai penelitian akuntansi sektor publik.
2. Bagi Penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pengetahuan mengenai kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, bermanfaat untuk menjadi masukan yang baik serta menambah informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya membahas Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Khusus pada Kepala Dinas dan bagian penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replika penelitian yang dilakukan Fifit Purnama dan Nadirsyah, Universitas Syiah Kuala tahun 2016 dengan judul “ Pengaruh

Pengawasan Keuangan Daerah, Aluntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Tahun pengamatan penelitian sebelumnya adalah tahun 2016 sedangkan penelitian ini adalah tahun 2019
2. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah pada SKPK Kabupaten Abdyo sedangkan pada penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis ini diuraikan dalam bab-bab sebagian berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematis penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian relevan yang menjadi referensi penulis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variable teknik analisis data

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan deskripsi hasil penelitian, Pengujian, Pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan, dan mengemukakan saran - saran untuk pengembangan hasil penelitiain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskriptif Teori.

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau kesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, 2012: 37)

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (nordiawan, 2012: 8)

Menurut Sumarsono (2010), pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Siaga (2014 : 213), pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjmin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

2.1.2. Pengertian Pengawasan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 : ”Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Manfaat dan Keuntungan Pengawasan

Menurut Harahap (2012: 313-315) yang mengemukakan apabila sistem pengawasan kerja itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar pengawasan dan metode yang sesuai maka diperoleh berbagai manfaat atau keuntungan antara lain:

1. Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah.

2. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan.
3. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.
4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab.
5. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi

2.1.4. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Adisasmita, (2011: 89) dalam Fifit (2016) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan merancang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Tanjung, (2012: 11), akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sedangkan menurut Bastian (2010: 11): Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan system pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum,

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya.

2.1.5 Pengertian Transparansi

Menurut Tanjung, (2012: 11), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adisasmita, (2011: 39) dalam Fifi (2016), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik mengenai integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berupa laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

2.1.6 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran dapat juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama

pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibeban kepadanya (Nordiawan, 2012: 19-20).

Terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategik daerah dan program pembangunan daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran.

Menurut Nordiawan, (2012: 47) anggaran merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat sifat pemerintah yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas.

Menurut Sujarweni, (2015: 28) anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang di harapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Nadirsyah, (2012: 64) kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan anggaran yang digambarkan secara spesifik, jelas, dan mudah dimengerti.

2.1.7 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja berasal dari kata performance yang artinya manner of functioning, artinya sejauhmana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan daerah tersebut.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007) kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Sujarweni, (2015: 107) kinerja merupakan hasil kerja dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan ,misi dan visi organisasi

Menurut Mahsun (2012: 141) kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seorang/kelompok terhadap pelaksanaan kegiatan program dalam periode tertentu sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Relevan

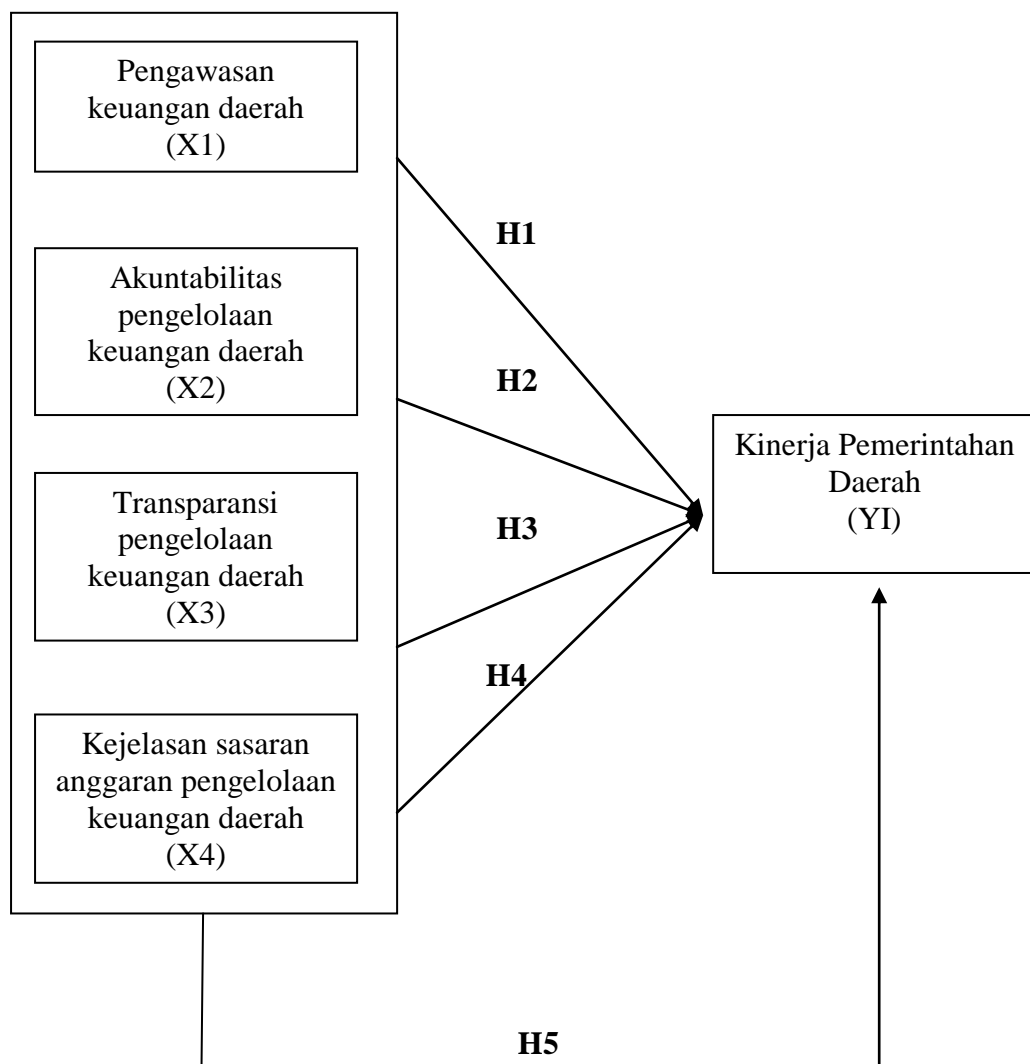
Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Netty Herawaty	2011	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah kota jambi	Variabel Dependens : - Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah Variable Independens : - Kejelasan sasaran anggaran - Pengendalian sistem pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap kehandalan struktur pengendalian intern. - Pengaruh parsial mempunyai pengaruh positif dan negatif. Variable yang mempunyai pengaruh negatif yaitu variable X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2(pengendalian akuntansi). - Variable yang mempunyai pengaruh positif yaitu variable sistem pelaporan (X3) - Besarnya pengaruh variable independens terhadap variable dependens yaitu sebesar 66,4%
Mei Anjarwati	2012	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap	Variabel Dependens : - Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Pengendalian akuntansi

		akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Variable Independen : - Kejelasan sasaran anggaran - Pengendalian akuntansi - Sistem pelaporan	tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan - Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan - Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan	2015	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng	Variabel Dependen : - kinerja pemerintahan daerah Variable Independen : - Pengawasan keuangan daerah - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Transparansi pengelolaan keuangan daerah	- Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah - Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah
Fifit Purnama, N adirsyah	2016	Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah pada	Variabel Dependen : - Kinerja pemerintahan daerah Variable Independen : - Pengawasan keuangan	- Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. - Pengawasan keuangan daerah berpengaruh

		Kabupaten Aceh Barat Daya	daerah - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Transparansi pengelolaan keuangan daerah	terhadap kinerja pemerintahan daerah. - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. - Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.
--	--	---------------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan mengenai pengawasa keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skematis Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Diduga pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu

H₂: Diduga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu

H₃: Diduga Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu

H₄: Diduga kejelasan sasaran anggaran pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu

H₅: Diduga pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Organisasi Perangkat Daerah yang dipilih menjadi objek penelitian merupakan Sekretariat, dinas-dinas dan badan-badan yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang disebarakan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2017). Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah dengan menggunakan *purposive sampling* adalah dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sample dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretariat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala, Bendahara, dan Sekretaris Inspektorat di Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala, Bendahara, dan Sekretaris semua Dinas di Kabupaten Rokan Hulu
4. Kepala, Bendahara, dan Sekretaris semua Badan di Kabupaten Rokan Hulu

Masing - masing Organisasi Perangkat Daerah akan diberikan 3 (tiga) kuesioner, sehingga total subjek penelitian yang akan diberikan kuesioner sebanyak 81 responden.

Tabel 3.1
Sampel Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Sampel
1	Sekretariat Daerah	3
2	Inspektorat	3
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3
4	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	3
5	Dinas Perhubungan	3
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3
8	Dinas Lingkungan Hidup	3
9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	3
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3
12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3
13	Dinas Koperasi UKM Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	3
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3

15	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	3
16	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3
17	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
20	Dinas Kesehatan	3
21	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	3
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3
24	Badan Pendapatan Daerah	3
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3
26	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	3
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
Jumlah Responden		81

Sumber:Rokanhuluab.go.id

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Sementara, alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS 18.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat maka harus menggunakan teknik pengumpulan data agar dapat memperoleh kesimpulan yang tepat dan tidak menyesatkan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kuesioner (Angket).

Kuesioner merupakan yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden atau karyawan yang menjadi sasaran kuesioner. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang memuat variable-variable yang disajikan sesuai dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya. Penyebaran kusioner dilakukan secara langsung kepada dinas-dinas terkait. Terkait dengan indikator-indikator variabel, maka diformulasikan dalam bentuk item pertanyaan/pernyataan yang masing-masing item terdapat range skor 1 sampai dengan 5, masing-masing jawaban memiliki bobot skor yang berbeda. Dari proses pemberian skor ini akan dihasilkan lima kategori jawaban yaitu :

Tabel 3.2
Skala Likert

KATEGORI	POIN
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono 2017

Untuk penelitian ini peneliti memilih menggunakan 5 kategori pilihan agar tidak ada variasi diantara jawaban-jawaban yang disediakan.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen.

3.6.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen atau disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2017). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.6.1.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variable independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengawasan Keungan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kejelasan Sasaran Anggaran.

1. Variable independen/bebas (X)

- a. Pengawasan Keuangan Daerah (X1)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalani secara efektif dan efisien dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Variable ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang dilakukan oleh penelitian Fifi (2016). Indikator dalam penelitian yaitu :

1. Penentuan Standar Pengawasan.
2. Pengukuran Hasil Pekerjaan
3. Perbandingan Hasil Dengan Standar.
4. Koreksi Penyimpangan

Setiap responden dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan/pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5. Kuisisioner pada penelitian ini diadopsi dari Fifi (2016) dengan 7 item pertanyaan.

b. Akuntabilitas (X2)

Menurut Tanjung, (2012: 11), akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Variable ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Fifi (2016). Indikator variabel akuntabilitas yaitu :

1. Proses pembuatan keputusan dibuat secara tertulis, memenuhi standar etika, dan sesuai dengan prinsip administrasi yang berlaku.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara – cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil.
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa

Sistem informasi manajemen dan minitoring hasil

Setiap responden dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan/pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5. Kuisisioner pada penelitian ini diadopsi dari Fifit (2016) dengan 8 item pertanyaan.

c. Transparansi (X3)

Menurut Tanjung, (2012: 11), akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Variable ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Fifit (2016). Indikator variabel transparansi yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur –prosedur, biaya – biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Setiap responden dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5. Kuisisioner pada penelitian ini diadopsi dari Fifi (2016) dengan 6 item pertanyaan.

d. Kejelasan Sasaran Anggaran (X4)

Menurut Nadirsyah, (2012: 64) kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Variable ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Amelia (2017). Indikator variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu :

1. Kejelasan rencana kerja dan anggaran
2. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik
3. keahlian dan pengetahuan
4. Faktor yang mendukung tujuan – tujuan instansi
5. Ketepatan anggaran dengan realisasi

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif dan tahun anggaran sebagai harapan dan evaluasi kinerja bagi instansi

Setiap responden dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5. Kuisisioner pada penelitian ini diadopsi dari Amelia (2017) dengan 6 item pertanyaan.

2. Variabel dependen/Terikat (Y)

a. Kinerja pemerintah daerah (Y)

Menurut Sujarweni, (2015: 107) kinerja merupakan hasil kerja dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Variable ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Fifit (2016). Indikator variabel Kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Masukan
2. Keluaran
3. Hasil
4. Manfaat
5. Dampak

Setiap responden dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan/ Pernyataan yang menggunakan skala likert 1-5. Kuisisioner pada penelitian ini diadopsi dari Fifit (2016) dengan 5 item pertanyaan.

Tabel 3.3
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Independen	Definisi	Indikator	Skala
Pengawasan keuangan daerah (X1)	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 : "Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk	1. Penentuan Standar Pengawasan. 2. Pengukuran Hasil Pekerjaan 3. Perbandingan Hasil Dengan Standar. 4. Koreksi Penyimpangan.	Likert

	menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan..		
Akuntabilitas (X ₂)	Menurut Tanjung, (2012: 11), akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembuatan keputusan dibuat secara tertulis, memenuhi standar etika, dan sesuai dengan prinsip administrasi yang berlaku. 2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara – cara mencapai sasaran suatu program. 3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil. 4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas. 5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa 6. Sistem informasi manajemen dan minitoring hasil 	Likert
Transparansi pengelolaan keuangan (X ₃)	Menurut Tanjung, (2012: 11), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruhan atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur – prosedur, biaya – biaya dan tanggung jawab. 2. Kemudahan akses informasi 3. Menyusun suatu 	Likert

	<p>pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap</p> <p>4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.</p>	
<p>Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)</p>	<p>Menurut Nadirsyah, (2012: 64) kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan rencana kerja dan anggaran 2. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik 3. keahlian dan pengetahuan 4. Faktor yang mendukung tujuan – tujuan instansi 5. Ketepatan anggaran dengan realisasi 6. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif dan tahun anggaran sebagai harapan dan evaluasi kinerja bagi instansi 	<p>Likert</p>
<p>Kinerja Pemerintah(Y)</p>	<p>Menurut Sujarweni, (2015: 107) kinerja merupakan hasil kerja dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan ,misi dan visi organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak 	<p>Likert</p>

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Dalam mengelola data peneliti menggunakan *software* SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). SPSS merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Keuntungan dengan menggunakan program SPSS adalah memudahkan perhitungan dan tingkat akurasi hasil perhitungan sangat tinggi. Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis jawaban responden yang disajikan menurut landasan teori yang digunakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat.

Rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

A : Konstanta

β : Koefisien Regresi

- X₁ : Pengawasan Keuangan Daerah
X₂ : Akuntabilitas
X₃ : Transparansi Pengelolaan Keuangan
X₄ : Kejelasan Sasaran Anggaran
e : Nilai Residu

3.7.2 Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada kuisisioner merupakan ukuran yang akan di uji. Agar data yang didapatkan dari para responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diukur, maka dilakukan dua macam tes yaitu uji validitas dan uji realibilitas.

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Untuk menguji reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Dengan melihat tingkat signifikan 0.05. jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka akan berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji bahwa seluruh variabel independent harus terbebas dari multikolinearitas atau antara variabel independent variabel tidak memiliki hubungan yang kuat. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis kolerasi antara variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada kolerasi yang cukup tinggi (diatas 0,05) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan metode uji Glejser. Uji Glejser merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolutresidual.

3.7.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dan menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/Independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Kriteria uji t:

- $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- $t_{hitung} < t_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.7.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah :

Uji statistik F digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria Uji F:

- $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- $F_{hitung} < F_{tabel}$, sig. 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak